

ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL DAERAH, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KAWASAN REGIONAL SUMBAGSEL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (ANALISIS DATA PANEL TAHUN 2015-2023)

Melita Sari ^{*1}
Budimansyah ²
Yulistia Devi ³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Raden Intan
Lampung, Indonesia

*e-mail: mellytasari004@gmail.com¹, budi@radenintan.ac.id², yulistiadevi@radenintan.ac.id³

Abstrak

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, karena tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data panel, yang terdiri atas data time series dan cross section dari lima provinsi di kawasan Sumbagsel, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Jambi. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Analisis dilakukan menggunakan model regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perimbangan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, secara simultan Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Dana Perimbangan, Belanja Modal Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract

Human development is one of the important indicators in measuring the success of regional economic development, because it not only focuses on economic growth, but also on improving the quality of life of the community through aspects of education, health, and economic welfare. This study uses a quantitative approach with panel data analysis methods, consisting of time series and cross-section data from five provinces in the Sumbagsel region, namely South Sumatra, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, and Jambi. The data was obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The analysis was conducted using a panel data regression model. The results of the study show that fiscal balance has a positive but insignificant effect on the human development index, capital expenditure has a positive and significant effect on the human development index, and local revenue has a positive and significant effect on the human development index simultaneously. Fiscal balance, capital expenditure, and local revenue affect the human development index.

Keywords: Human Development Index, Balancing Funds, Capital Expenditure, Regional Original Income

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. (Fretes, 2017). Pembangunan manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan manusia yang meliputi 3 komponen yaitu kesehatan berupa angka harapan hidup, pendidikan berupa angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan daya beli berupa pendapatan perkapita. untuk melakukan pembangunan manusia tersebut menjadi tugas penting bagi pemerintah yang bertanggung jawab sebagai pihak stakeholder yang dilakukan melalui berbagai kebijakan, berupa kebijakan fiskal yang instrumennya mengarah pada pengalokasian dana atau anggaran pembangunan ke bidang yang berkaitan yaitu pengeluaran pemerintah. (Safitri, 2016)

Pada periode tahun 2015-2023, Indonesia mengalami peningkatan IPM. Pada tahun 2023, IPM Indonesia mencapai 74,39%, meningkat 0,62 poin (0,84%) dibandingkan tahun sebelumnya (73,77%). Peningkatan IPM tersebut terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Peningkatan IPM di Indonesia merupakan hasil dari berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya-upaya tersebut meliputi peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. (Ummah, 2024)

Kawasan Sumbagsel, yang terdiri dari Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung, merupakan wilayah dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang sangat beragam. Meskipun kawasan ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, masih banyak daerah di Sumbagsel yang menghadapi masalah ketimpangan pembangunan. Beberapa daerah memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang terbatas, serta infrastruktur yang kurang memadai. (Kurniawan, 2025). Ketimpangan tersebut menunjukkan adanya masalah dalam efektivitas pengelolaan keuangan daerah, baik dalam hal pemanfaatan dana perimbangan, pengalokasian belanja modal, maupun optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan variabel utama dalam penelitian ini.

Dari data dari BPS dari tahun 2015-2023, indeks pembangunan manusia yang tertinggi terdapat provinsi Bangka Belitung dengan angka 72,85%. Sedangkan provinsi yang memiliki indeks pembangunan manusia paling rendah yaitu provinsi Lampung dengan angka 71,15%. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah provinsi Lampung harus bias mengambil tindakan supaya angka indeks pembangunan manusianya meningkat.

Teori ekonomi publik menjelaskan bahwa salah satu spek yang sangat menentukan dalam pencapaian pembangunan manusia di tingkat daerah adalah alokasi dan pengelolaan sumber daya keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Belanja Modal Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana Perimbangan, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK), memainkan peran penting dalam pemerataan pembangunan antar daerah. Namun data empiris di lapangan menunjukkan bahwa tingginya alokasi dana fiskal tidak selalu selaras dengan peningkatan IPM di banyak daerah, termasuk kawasan Sumbagsel. Sebagai contoh, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung merupakan dua daerah dengan alokasi Dana Perimbangan dan PAD yang terus meningkat dari tahun ke tahun, namun IPM keduanya masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2023, IPM Sumatera Selatan hanya mencapai 71,62% dan Lampung 71,16%. Demikian pula, Provinsi Bengkulu yang memiliki PAD relatif kecil, justru mampu menunjukkan peningkatan IPM yang cukup stabil, pada tahun 2023 IPM Bangka Belitung mencapai 72,85%. Fakta ini mengindikasikan bahwa besarnya dana yang dialokasikan belum tentu sebanding dengan capaian pembangunan manusianya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan anggaran tersebut.

Menurut data dari Website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dari tahun 2015-2023, dana perimbangan memiliki perbedaan di setiap provinsi. Perbedaan alokasi dana perimbangan antar Provinsi mencerminkan penerapan prinsip keadilan fiskal dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia. Secara teoritis, alokasi dana perimbangan ditentukan berdasarkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah, di mana Sumatera Selatan, dengan luas wilayah yang lebih besar, jumlah penduduk yang lebih tinggi, serta kompleksitas administrasi yang lebih besar akibat banyaknya kabupaten/kota, cenderung memperoleh alokasi yang lebih besar. Selain itu, tingginya kontribusi Sumatera Selatan terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam seperti batu bara dan migas, turut meningkatkan proporsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima.

Namun Sebaliknya, Bangka Belitung yang memiliki wilayah dan jumlah penduduk lebih kecil serta kapasitas fiskal yang relatif lebih stabil dari sektor pertambangan tertentu, menerima alokasi yang lebih rendah karena dianggap memiliki kebutuhan fiskal yang lebih rendah. Hal ini mencerminkan bahwa alokasi dana perimbangan tidak bersifat merata, melainkan berdasarkan parameter objektif dan formula yang ditetapkan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas distribusi fiskal antar daerah. Sementara itu, Belanja Modal Daerah berperan dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Belanja modal yang lebih besar berada di Provinsi Sumatera Selatan dibandingkan dengan provinsi lainnya disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam skala pembangunan, luas wilayah, dan kebutuhan infrastruktur. (Latuheru & Gobay, 2024) Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan wilayah yang jauh lebih luas, jumlah penduduk yang lebih besar, serta jumlah kabupaten/kota yang lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya. Konsekuensinya, kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya menjadi lebih kompleks dan menyeluruh, yang memerlukan alokasi belanja modal yang lebih besar. Selain itu, sebagai salah satu provinsi penyangga ekonomi di Sumatera, Sumatera Selatan memiliki lebih banyak proyek strategis nasional dan daerah yang membutuhkan investasi jangka panjang, yang tercermin dalam belanja modalnya. Sementara itu, Bangka

Belitung, dengan wilayah yang lebih kecil dan kepadatan penduduk yang lebih rendah, memiliki kebutuhan pembangunan infrastruktur yang relative terbatas, sehingga alokasi belanja modalnya pun lebih kecil. Dengan demikian, besarnya belanja modal erat kaitannya dengan besaran kebutuhan pembangunan fisik dan prioritas pengembangan wilayah secara makro. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi local untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara mandiri.

Menurut data dari Website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dari tahun 2015-2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan relatif lebih besar dibandingkan provinsi lain di wilayah Sumbagsel karena didorong oleh diversifikasi sektor ekonomi yang kuat, terutama dari sektor pertambangan, perkebunan, industri pengolahan, dan perdagangan. Secara fiskal, kapasitas Sumatera Selatan dalam mengelola sumber daya alam, khususnya batubara dan migas, memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan dari pajak daerah dan retribusi. Selain itu, keberadaan pusat pertumbuhan ekonomi seperti Kota Palembang mendorong aktivitas ekonomi yang tinggi, sehingga memperluas basis pajak dan meningkatkan efektivitas pemungutan PAD. Dengan struktur ekonomi yang lebih kompleks dan potensi fiskal yang tinggi, Sumatera Selatan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menghasilkan PAD dibandingkan provinsi-provinsi tetangganya di kawasan Sumbagsel.

Secara khusus, di kawasan regional Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan), terdapat berbagai perbedaan dalam hal kapasitas fiskal daerah dan kondisi sosial-ekonomi. Daerah-daerah di kawasan ini, seperti Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, dan Bengkulu, memiliki tingkat pembangunan yang berbeda-beda, baik dari segi infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis yang mendalam terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di kawasan ini, untuk menentukan langkah-langkah kebijakan yang tepat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan Sumbagsel. (Silalahi et al., 2023)

Menyoroti keuangan daerah di Sumbagsel tidak bisa dilepaskan dari kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal dipilih sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi publik agar terjadi peningkatan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Fretes, 2017) Pemerintah daerah juga dapat mengoptimalkan potensi dari sisi pengeluarannya, misalnya dengan cara mengalokasikan belanja modal yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat daripada untuk kepentingan belanja aparatur. Selain pembiayaan dari pemerintah daerah, dapat juga dalam mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermula pada pemerintah pusat. Sumber pendanaan yang bermula pada pemerintah pusat dapat berupa dana perimbangan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan Dana Perimbangan demi mengatasi hal tersebut. Biaya skala ialah investasi wilayah yang bermula pada taksiran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang didistribusikan bagi daerah demi memenuhi keperluan wilayah selama bagan penerapan sistem desentralisasi. (Hanantoko, 2020)

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adel Riviando, dkk. dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”, menyimpulkan hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan Martin Tamaro Siburian, dkk dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018”, menyimpulkan bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ulang mengenai pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Upaya perbaikan penelitian ini juga dilakukan dengan memperbaharui tempat penelitian dan model penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan melakukan penelitian di wilayah Sumbagsel. Adanya ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap IPM. Unit analisis dari penelitian ini adalah semua provinsi yang terletak di wilayah sumbagsel. Wilayah sumbagsel ini dipilih karena menurut data dari republika.co.id menunjukan bahwasanya angka IPM untuk wilayah Sumbagsel menunjukan peningkatan setiap tahunnya.

METODE

Penelitian ini mengacup ada paradigma kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu gabungan data cross section yang diambil dari kabupaten/kota di kawasan sumatera bagian selatan terdiri dari Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, dan Lampung dan data time series selama 9 tahun 2015-2023. Prosedur pengambilan data dengan metode data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Uji chow**

Uji Chow dilakukan untuk menentukan antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) yang paling sesuai untuk estimasi data panel. Jika *probailitas cross sectional* $F > 0,05$ maka didukung, yang artinya menggunakan *Common Effect Model* (CEM). Namun, jika nilai *cross sectional* $F < 0,05$ maka tidak didukung, yang artinya *Fixed Effect Model* (FEM) yang paling sesuai untuk estimasi data panel. (Misna Ariani, Didik Hadiyatno, 2023)

Tabel 1.1
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0,787877	(4,37)	0,5405
Cross-section Chi-square	3,678396	4	0,4513

Sumber data: Olah Data E-Views-10 (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa nilai *Prob. Cross-section Chi-square* sebesar 0,4513 yang artinya $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *Common Effect Model* (CEM) lebih baik dibandingkan *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman

Setelah melakukan uji *chow* dan yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM). Kemudian data panel dibandingkan lagi untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Jika *probabilitas Chi-Square* $> 0,05$, maka di dukung, yang artinya *Random Effect Model* (REM) yang terpilih. Namun jika *probabilitas Chi-Square* $< 0,05$, maka tidak didukung, yang artinya *Fixed Effect Model* (FEM) yang paling sesuai untuk estimasi data panel. (Misna Ariani, Didik Hadiyatno, 2023)

Tabel 1.2
Hasil Uji Hausman

Sumber : Olah Data E-Views-10 (2025)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa nilai *Prob. Cross-section Chi-square* sebesar 0,3707 yang artinya $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *Random Effect Model* (REM) lebih baik dibandingkan *Fixed Effect Model* (FEM).

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	3,139229	3	0,3707

Uji LM (Lagrange Multiplier)

Setelah melakukan uji hausman dan yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). Kemudian data panel dibandingkan lagi untuk menentukan model terbaik antara *Cammon Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Jika probabilitas *Breusch Pagan* $> 0,05$, maka didukung, yang artinya *Cammon Effect Model* (CEM) yang terpilih. Namun jika *probabilitas Breusch Pagan* $< 0,05$, maka didukung, yang artinya *Random Effect Model* (FEM) yang paling sesuai untuk estimasi data panel. (Misna Ariani, Didik Hadiyatno, 2023)

Tabel 1.3
Hasil Uji LM

Null (no rand. Effect) Alternative	Cross-section One- sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	2,469527	0,332828	2,802355
	(0,1161)	(0,5640)	(0,0941)

Sumber : Olah Data E-Views-10 (2025)

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa nilai *Prob. Breusch Pagan* sebesar 0,1161 yang artinya $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *Cammon Effect Model* (CEM) lebih baik dibandingkan *Random Effect Model* (REM).

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Keberartian Parsial)

Uji signifikansi secara parsial atau uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tak bebas.

a. Taraf Nyata

Dengan menggunakan signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), dengan $df (n-k) = (45 - 4) = 41$, maka diperoleh t tabel sebesar 1,68288 ($n = \text{jumlah observasi}$, $k = \text{jumlah variabel}$).

b. Kriteria Pengujian

didukung jika $t_{hitung} < 1,68288$. Tidak didukung jika $t_{hitung} > 1,68288$.

c. Rumusan Hipotesis Statistik

Pengujian variabel Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 1.4
Hasil uji t
Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah

Variabel	Koefisien	t-statistik	t-tabel	Probabilitas	Kesimpulan
DP	0,259087	1,462505	1,68288	0,1512	Tidak Didukung
BM	0,975049	1,699708	1,68288	0,1006	Didukung
PAD	0,421666	2,221359	1,68288	0,0319	Didukung

Sumber : Olah Data E-Views-10 (2025)

Berikut rumusan hipotesis statistik:

$H_0 : \beta_1 < 1,68288$, artinya Dana Perimbangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015– 2023.

$H_a : \beta_1 > 1,68288$, artinya Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015 – 2023.

$H_0 : \beta_1 < 1,68288$, artinya Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015 – 2023.

$H_a : \beta_1 > 1,68288$, artinya Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015 – 2023

$H_0 : \beta_1 < 1,68288$, artinya Pendapatan Asli Daerah Tingkat Pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015 – 2023. $H_a : \beta_1 > 1,68288$, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015 – 2023.

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa t-hitung sebesar 1,462505 lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1,68288. Maka H_0 didukung dan H_a tidak didukung, berarti variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2015–2023.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa t-hitung sebesar 1,699708 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,68288. Maka H_a didukung dan H_0 tidak didukung, berarti variabel Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2015–2023.

Selanjutnya berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa t-hitung sebesar 2,221359 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,68288. Maka H_a didukung dan H_0 tidak didukung, berarti variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2015–2023.

Uji Signifikansi Simultan

Uji F digunakan untuk pengujian pengaruh variabel-variabel bebas secara keseluruhan atau secara bersama-sama, yaitu untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dari tahun 2015-2023.

a. Taraf Nyata

Dengan taraf nyata (α) = 5 % atau tingkat keyakinan 95% dengan derajat kebebasan $df = (k-1 (df1)) (n-k-1 (df2)) = (4-1) (45-4-1) = (3) (40)$, diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,839 untuk seluruh model persamaan. (k = Total Variabel, n = jumlah observasi).

b. Kriteria Pengujian

H_0 Didukung jika $F_{hitung} < 2,839$.

H_0 Tidak didukung jika $F_{hitung} > 2,839$.

c. Rumusan Hipotesis Statistik

Pengujian variabel dana perimbangan, belanja modal dan pendapatan asli daerah secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia.

Tabel 1.5
Hasil Uji F (DP, BM dan PAD)

Variabel	F-statistik/F-hitung	F-tabel	Prob.	Kesimpulan
DP, BM dan PAD	3,384237	2,839	0,0000	Didukung

Sumber: Olah data Eviews-10 (2025)

Berikut rumusan hipotesis statistik:

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, < 2,839$, artinya Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kesehatan, Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dari tahun 2015-2023.

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 > 2,839$, artinya Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dari tahun 2015-2023.

Berdasarkan tabel 1.5 dapat dilihat bahwa F-hitung sebesar 3,384237 lebih besar daripada F-tabel sebesar 2,839. Maka H_0 tidak didukung dan H_a didukung, berarti Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dari tahun 2015-2023.

Koefisien Determinasi

Tabel 1.6
Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel	F-statistik	R-Square	Prob.
DP, BM dan PAD	3,384237	0,198478	0,027010

Sumber : Olah Data E-Views-10 (2025)

Berdasarkan dari tabel 1.6 dapat dilihat bahwa nilai *R-square* sebesar 0,19 atau 19%, artinya model ini mampu menjelaskan pengaruh dana perimbangan, belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Sementara 81% lainnya di pengaruhi oleh variabel lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini. Pertama, dana perimbangan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dana secara efisien, penggunaan dana yang lebih banyak untuk belanja rutin daripada pembangunan manusia, serta dampak pembangunan yang bersifat jangka panjang dan tidak langsung terlihat dalam periode waktu yang pendek, sehingga dana perimbangan tidak secara langsung berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Kedua, Belanja modal meemiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Ketika belanja modal meningkat maka indeks pembangunan manusia meningkat hal ini disebabkan Belanja modal yang dialokasikan pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan secara langsung meningkatkan akses dan kualitas layanan publik. Sekolah yang layak, sarana belajar yang memadai, serta fasilitas kesehatan yang mudah diakses akan meningkatkan angka partisipasi sekolah, derajat kesehatan, dan harapan hidup masyarakat.

Ketiga, Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) yang artinya meningkatnya pendapatan asli daerah akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan keuangan daerah, maka semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Keempat, Secara simultan Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sumbagsel tahun 2015-2023.

Kelima, Perspektif ekonomi islam menempatkan pembangunan manusia sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi, bukan hanya pertumbuhan materil semata. Dalam ekonomi Islam, pembangunan diukur berdasarkan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat), yang mencakup lima dimensi perlindungan: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).

DAFTAR PUSTAKA

- Fretes, P. N. de. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 2(2), 1–33.
- Hanantoko, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 17.
- Kurniawan, M. (2025). *PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERGESERAN SEKTORAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH AREA SUMBAGSEL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2015-2023*. 09(02), 1–14.
- Latuheru, A., & Gobay, O. (2024). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 65–74.
- Misna Ariani, Didik Hadiyatno, D. H. H. A. (2023). *Metodologi Penelitian: Langkah Mudah Menulis Skripsi dan Tesis*. PT Raja Grafindo Persada.
- Safitri, I. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan

- Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 1(1), 66–76.
- Silalahi, S. K., Arief, M., & Indrafana, I. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Pemerintahan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 24407–24419.
- Ummah, S. (2024). Analisis Deskriptif Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Periode Tahun 2020 - 2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 41–53.